



**SALINAN**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 141 );

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
8. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
9. Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

11. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
13. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
15. Belanja Hibah adalah hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan - 50 - belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
18. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
19. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
20. Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
21. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.500.641.519.000 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.288.454.257.000, yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.400.000.000.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.424.408.000.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.423.916.000.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.137.205.933.000.

## Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.400.000.000, yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel Rp. 4.500.000.000.
  - b. Pajak restoran Rp.5.700.000.000.
  - c. Pajak hiburan Rp.1.000.000.000
  - d. Pajak reklame Rp.2.500.000.000
  - e. Pajak penerangan jalan Rp.28.500.000.000.
  - f. Pajak parkir Rp.1.000.000.000.
  - g. Pajak air tanah Rp.200.000.000.
  - h. Pajak sarang burung walet Rp.4.000.000.000.
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp.8.000.000.000
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.17.000.000.000.
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.28.000.000.000.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.424.408.000, yang terdiri atas :
  - a. Retribusi jasa umum Rp.13.932.500.000.
  - b. Retribusi jasa usaha Rp.12.568.410.000.
  - c. Retribusi perizinan tertentu Rp. 8.923.498.000.

- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.423.916.000, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.137.205.933.000, yang terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.500.000.000;
  - b. Jasa Giro Rp.2.173.833.000;
  - c. Pendapatan Bunga Rp.1.500.000.000;
  - d. Pendapatan Denda Pajak Rp.500.000.000;
  - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp.32.100.000;
  - f. Pendapatan dari Pengembalian Rp.500.000.000;
  - g. Pendapatan BLUD Rp.132.000.000.000.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.193.971.309.000, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.096.971.309.000.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.000.000.000

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.096.971.309.000 yang terdiri atas :
  - a. Dana perimbangan Rp. 1.012.531.590.000.
  - b. Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal Rp. 11.239.188.000.
  - c. Dana Desa Rp. 73.200.531.000.
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 97.000.000.000, yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.18.215.953.000, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.656.000.000;
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.559.953.000.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.656.000.000, yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.559.953.000, yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp.17.559.953.000.

#### Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.519.572.915.000, yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.011.230.893.323, yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 576.745.438.876.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 381.807.366.157.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.503.588.290.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.174.500.000.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 576.745.438.876, yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 293.368.027.733.



- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 122.940.667.723.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.70.488.237.420.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp.16.014.224.000.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp.500.000.000.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 634.282.000.
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.72.800.000.000.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 381.807.366.157, yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 66.699.017.936.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 161.518.598.829.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 12.521.385.505.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 61.655.887.592.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 3.997.380.000.
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp.22.787.596.295
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp.52.627.500.000.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.503.588.290, yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 40.051.308.290.
- (3) Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.501.800.000
- (4) Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp.1.950.480.000.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.174.500.000 yang terdiri atas :
  - a. Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.829.500.000.
- (3) Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.345.000.000.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 336.644.633.577, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.082.646.957.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.328.158.973.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.440.736.804.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 182.116.148.173.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.876.942.670
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.800.000.000

Pasal 17

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.082.646.957, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332.646.957
- (3) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.750.000.000

Pasal 18

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.328.158.973, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan ;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal rambu-rambu;
  - k. Belanja modal peralatan olahraga;
  - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.757.331.155.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.821.618.649.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.974.997.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.138.156.244.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.822.955.072.
- (7) Belanja modal studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.394.986.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.22.260.789.663.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar huruf h Rp.374.955.311.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.146.344.691.
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.749.982

- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.29.560.716.
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.7.267.327.507.
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000.

#### Pasal 19

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.440.736.804, yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.869.599.530
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol / pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.248.637.274.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.22.322.500.000

#### Pasal 20

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 182.116.148.173, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal Instalasi;
  - d. Belanja modal jaringan
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 162.837.681.745.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.949.446.428.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.000.000.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.199.020.000.

#### Pasal 21

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.876.942.670, yang terdiri atas :
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga;
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.618.180.
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian / kebudayaan / olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.402.692.
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.236.045.600.
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.539.876.198.

#### Pasal 22

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.800.000.000, yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

#### Pasal 23

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.164.197.388.100, yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil;
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.582.441.600.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.614.946.500.

#### Pasal 25

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.582.441.600, yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.446.309.700.
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.136.131.900.

Pasal 26

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.614.946.500, yang terdiri atas :
  - a. Belanja bantuan keuangan antar daerah Provinsi;
  - b. Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.000.000.
- (3) Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.369.946.500.

Pasal 27

- Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.18.931.396.000, yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp.58.931.396.000, yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 direncanakan sebesar Rp.58.931.396.000, yang terdiri atas :
  - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - b. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - c. Penghematan belanja;
  - d. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.306.977.000.
- (3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.124.419.000 (*empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000.
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.000.000.000.

### Pasal 30

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000.000, yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000

### Pasal 31

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.18.931.396.000.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.18.931.396.000.

### Pasal 33

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 23 Desember 2022

**Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**ANANG DIRJO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 23 Desember 2022

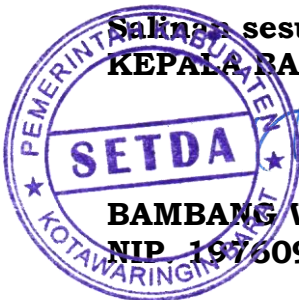
**Pjt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**JUNI GULTOM**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 113

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010**



**LAMPIRAN I**  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 113 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2023

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>288.454.257.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	100.400.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.314.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.314.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	6.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	6.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	180.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	180.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	5.700.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.080.917.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.080.917.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.487.931.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.487.931.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	986.206.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	986.206.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	358.740.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	358.740.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	786.206.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	786.206.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	277.459.000

4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	277.459.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	203.688.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	203.688.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	111.475.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	111.475.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	203.688.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	203.688.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	203.690.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	203.690.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.500.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.864.193.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.864.193.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	508.646.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	508.646.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	127.161.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	127.161.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	28.500.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.688.284.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.688.284.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.811.716.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	26.811.716.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.000.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000

4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	4.000.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	4.000.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	17.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	17.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	17.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	28.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.375.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.375.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	24.625.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	24.625.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	35.424.408.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	13.932.500.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.400.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.237.411.000
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	1.162.589.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.400.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.400.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	236.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	271.254.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	4.492.746.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	382.500.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	382.500.000

4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.568.410.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.516.100.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	372.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	60.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	950.600.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	825.000.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	108.500.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	3.200.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	392.500.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	392.500.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	845.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	845.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.100.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.364.810.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	214.500.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	150.310.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	1.000.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.923.498.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.450.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.450.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.500.000
4.1.02.03.04.0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	1.500.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	620.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	620.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.297.548.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.297.548.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.423.916.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.423.916.000

4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.423.916.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.423.916.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	137.205.933.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	350.000.000
4.1.04.01.02.0001	Hasil Penjualan Alat Besar	100.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	250.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	150.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	150.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	2.173.833.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.900.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.900.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	273.833.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	273.833.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000.000
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	350.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	250.000
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	50.000
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	50.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	200.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	50.000
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	50.000
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	50.000
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	100.000
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	50.000
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	50.000
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.050.000

4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	50.000
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.500.000
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	500.000
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	496.700.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	496.700.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	32.100.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	8.289.000
4.1.04.13.01.0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.087.000
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	4.202.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	23.811.000
4.1.04.13.03.0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	23.811.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	132.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	132.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	132.000.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.193.971.309.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.096.971.309.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.012.531.590.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	155.254.797.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	30.866.778.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13.902.178.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	834.548.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	28.326.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	202.623.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	96.761.571.000

4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.455.798.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.202.975.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	616.439.358.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	589.323.832.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.515.526.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.068.584.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	481.527.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.754.879.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.799.359.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.357.526.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	17.525.363.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	26.938.709.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.756.161.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	301.799.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	21.153.261.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	133.768.851.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	39.411.600.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.685.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	53.562.612.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.179.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	598.506.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.888.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.027.580.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22.516.578.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	429.440.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.141.795.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	318.370.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	752.320.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	448.700.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000

4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	370.150.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	11.239.188.000
4.2.01.02.01	DID	11.239.188.000
4.2.01.02.01.0001	DID	11.239.188.000
4.2.01.05	Dana Desa	73.200.531.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	73.200.531.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	73.200.531.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.000.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	87.000.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	87.000.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.435.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.845.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.278.500.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	76.500.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40.365.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.000.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.000.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.000.000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>18.215.953.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	656.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	656.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	656.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	656.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.559.953.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.559.953.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.559.953.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.559.953.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.500.641.519.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.011.230.893.323</b>



5.1.01	Belanja Pegawai	576.745.438.876
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	293.368.027.733
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	215.607.479.617
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	199.877.543.617
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	15.729.936.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.210.564.283
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.262.286.283
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.948.278.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.294.800.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.294.800.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.430.966.463
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.952.262.463
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.478.704.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.531.127.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.531.127.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.179.637.320
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.146.802.320
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.032.835.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	788.816.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	766.066.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	22.750.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	239.547.352
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	239.275.352
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	272.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.271.674.787
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.478.872.787
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	792.802.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	453.363.228
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	418.047.228
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	35.316.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.360.051.683

5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.254.112.683
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	105.939.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	122.940.667.723
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	61.576.621.344
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	60.629.143.344
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	947.478.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	84.850.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	84.850.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	352.535.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	352.535.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.065.264.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.065.264.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	53.861.397.379
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	52.440.181.379
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.421.216.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.488.237.420
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.562.612.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	53.562.612.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	598.506.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	598.506.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.179.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.179.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.682.354.420
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	14.682.354.420
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	465.765.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	448.365.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.014.224.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.616.000

5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.616.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	102.402.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	102.402.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.096.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.096.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.139.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.139.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.241.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.241.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.356.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.356.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	23.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	23.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.510.779.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	68.839.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.382.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.146.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.436.412.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.795.200.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.795.200.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	500.000.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	500.000.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	30.240.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	36.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.400.000

5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	16.560.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	160.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.400.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.440.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	104.960.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	634.282.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	432.682.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	432.682.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	72.800.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	72.800.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	72.800.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.807.366.157
5.1.02.01	Belanja Barang	66.699.017.936
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	66.479.939.705
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.196.061.280
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	892.339.806
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.077.986.535
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	109.935.380
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	95.437.344
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	240.130.749
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	117.840.385
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.518.225.599
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	205.738.603
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	179.648.050
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	59.396.932
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.462.386

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.722.742.084
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.811.698.562
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.736.011.028
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	301.200.300
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	280.125.507
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.166.198.967
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	681.507.882
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.680.952
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	227.486.303
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	597.978.499
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.031.285.986
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	187.114.886
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.330.235.293
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	706.880.769
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	63.825.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.537.069.006
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	487.527.898
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.960.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.327.543.190
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	546.457.850
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	189.060.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	26.848.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.812.905.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.931.810
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	150.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	567.348.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	243.484.358
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	142.900.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	67.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	54.975.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	605.574.526

5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	148.180.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	219.078.231
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	67.078.131
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	152.000.100
5.1.02.02	Belanja Jasa	161.518.598.829
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	108.696.954.107
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.649.685.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.043.500.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	210.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	345.700.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.647.600.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.440.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	5.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	192.231.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	83.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.667.310.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.661.368.665
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	828.908.370
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.323.267.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.066.940.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.049.300.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	579.950.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	78.900.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	758.593.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.483.778.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	382.907.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	74.885.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.169.623.200
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.132.031.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	613.430.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.378.154.000

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.394.539.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.206.481.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	359.160.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.574.080.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	302.527.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	85.503.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	99.347.500
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	27.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	365.596.000
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	81.070.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.856.091
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	48.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.397.999.539
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	60.200.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	36.750.290
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	89.143.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	293.830.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1.016.643.651
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.620.542.311
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	270.509.888
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	653.286.897
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.808.661.680
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	480.960.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.680.212.344
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	47.692.750
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	145.365.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	496.999.931
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	472.646.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	148.450.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	28.354.379.031
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	743.775.600

5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	21.001.540.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.679.969.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.724.034.560
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	495.025.186
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	437.548.592
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	272.485.493
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.977.940.600
5.1.02.02.04.0002	Belanja Sewa Grader	726.651.200
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	528.808.800
5.1.02.02.04.0006	Belanja Sewa Asphalt Equipment	19.790.400
5.1.02.02.04.0007	Belanja Sewa Compacting Equipment	82.621.200
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	143.110.100
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	19.964.000
5.1.02.02.04.0024	Belanja Sewa Mesin Bor	19.790.400
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	420.879.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	125.450.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	523.742.500
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	261.253.000
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	60.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.780.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	7.100.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.294.041.818
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	249.568.100
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	340.950.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	661.523.718
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	42.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	142.257.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	136.257.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	6.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	14.502.014.273



5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.000.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	71.190.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.752.727.273
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	9.821.527.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	56.570.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	200.000.000
5.1.02.02.09.0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	200.000.000
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	300.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	514.414.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	87.818.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	426.596.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.785.453.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	173.840.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.367.550.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.244.063.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	251.145.000
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	224.505.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	26.640.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.521.385.505
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	199.973.520
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	199.973.520
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.518.539.050
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	6.473.121
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	33.476.625
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	31.359.000
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	70.000.000
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	14.741.250
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10.779.838
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	110.495.748
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	659.878.007

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.269.614.793
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	453.013.941
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	23.029.900
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	91.000.000
5.1.02.03.02.0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam	51.115.500
5.1.02.03.02.0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	20.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	113.333.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	383.939.842
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	4.000.000
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	26.125.000
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	25.125.000
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	24.187.500
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	30.625.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	86.250.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	468.722.050
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	39.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	364.253.935
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000
5.1.02.03.02.0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	3.000.000
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	72.500.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	3.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.574.892.935
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.234.373.927
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	9.564.093
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	304.673.123
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	26.281.792
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.227.980.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.700.000.000

5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.000.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.942.100.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.585.880.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.655.887.592
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.655.887.592
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.990.432.680
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.204.358.912
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.057.112.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.403.984.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.997.380.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.997.380.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.934.880.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	82.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	10.500.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.970.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.787.596.295
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.787.596.295
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.787.596.295
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.627.500.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.627.500.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.627.500.000
5.1.05	Belanja Hibah	50.503.588.290
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.051.308.290
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.923.371.336
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.499.480.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.423.891.336
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	33.806.367.454
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	30.563.800.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.242.567.454
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	321.569.500

5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	125.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	196.569.500
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.501.800.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.501.800.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.501.800.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.174.500.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.829.500.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.479.500.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.479.500.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	350.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	350.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	345.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	345.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	345.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>336.644.633.577</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.082.646.957
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	332.646.957
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	137.252.760
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	106.552.760
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	30.700.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	195.394.197
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	195.394.197
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	3.750.000.000
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	3.750.000.000
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	3.750.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.328.158.973
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	757.331.155
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	749.999.916

5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	749.999.916
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7.331.239
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	7.331.239
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.821.618.649
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.802.868.640
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.075.691.364
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.661.721
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.515.555
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	640.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	18.750.009
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	18.750.009
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	56.974.997
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	56.974.997
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.999.997
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	53.975.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.138.156.244
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.138.156.244
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	9.084.595
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	35.671.649
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.093.400.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.822.955.072
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	475.493.401
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	475.493.401
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.343.340.241
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.648.287.834
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	32.994.988
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	462.767.529
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.172.194.709
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	27.095.181
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.121.430

5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.121.430
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	150.394.986
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	29.860.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	29.860.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	120.534.986
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	120.534.986
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.260.789.663
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	22.260.789.663
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	22.213.238.148
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	25.429.403
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	22.122.112
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	374.955.311
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	374.955.311
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	242.398.640
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	110.911.670
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	21.645.001
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.146.344.691
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.910.772.163
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.910.772.163
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.235.572.528
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.146.177.687
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	27.567.874
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	61.826.967
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.749.982
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.749.982
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.749.982
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	29.560.716
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	29.560.716
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	29.560.716
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.267.327.507
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.267.327.507

5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.267.327.507
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.500.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.500.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.500.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.440.736.804
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	66.869.599.530
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.113.994.530
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	13.412.473.482
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	191.059.200
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.654.993.567
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.333.225.600
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	9.075.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	53.280.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	346.800.324
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	157.264.963
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	11.889.897.394
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.755.605.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	2.755.605.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	248.637.274
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	248.637.274
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	218.337.274
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	30.300.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.322.500.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.322.500.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.322.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	182.116.148.173
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	162.837.681.745
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	131.999.736.741
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	131.122.416.991
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	877.319.750
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	30.837.945.004

5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	28.908.715.861
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	557.111.319
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.372.117.824
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	18.949.446.428
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.648.359.734
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.648.359.734
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	13.029.061.000
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	13.029.061.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.272.025.694
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.272.025.694
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	130.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	130.000.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	130.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	199.020.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	199.020.000
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	199.020.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.876.942.670
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	95.618.180
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	95.618.180
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	29.329.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	66.289.180
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.402.692
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	5.402.692
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	5.402.692
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.236.045.600
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.236.045.600
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	410.881.600
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	200.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	625.164.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.539.876.198
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.539.876.198



5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.539.876.198
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.800.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3.800.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	3.800.000.000
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.800.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.500.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>164.197.388.100</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.582.441.600
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.446.309.700
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.446.309.700
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.446.309.700
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.136.131.900
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.136.131.900
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.136.131.900
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.614.946.500
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	245.000.000
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	245.000.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	150.369.946.500
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	77.169.415.500
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	77.169.415.500
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	73.200.531.000
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	73.200.531.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.519.572.915.000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(18.931.396.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	

<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>58.931.396.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58.931.396.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	10.306.977.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	10.306.977.000
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	2.000.000.000
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	7.263.306.188
6.1.01.02.01.0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.043.670.812
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	25.124.419.000
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	25.124.419.000
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	25.124.419.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	500.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	500.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	500.000.000
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	23.000.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	23.000.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	23.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>58.931.396.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.000.000.000</b>

6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	15.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>40.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>18.931.396.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

**PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**ANANG DIRJO**

